

---

## **DISKURSUS GENDER DALAM WACANA MODERNITAS DAN POSTMODERNITAS (Satu Perspektif Sosiologi Pendidikan)**

Oleh: M. Khusna Amal

### **Abstrak**

*Perbincangan realitas antara laki-laki dan perempuan (gender) menguat setelah kemunculan gerakan renaissance yang menandai lahirnya era modernitas. Perbincangan itu sendiri kemudian menjelma menjadi gerakan praksis yang disponsori kelompok perempuan terdidik guna menggugat struktur sosial yang patriarkis. Adapun trends gerakan perempuan pada era modern itu lebih berorientasi kepada isu-isu global dan cenderung mengabaikan aspek local knowledge. Kritik terhadap gerakan gender era modernitas kemudian melahirkan diskursus dan gerakan gender post-modernitas yang mencoba untuk mengangkat kembali aspek local knowledge sebagai model sosial gerakan. Perbincangan dan sekaligus gerakan praksis gender baik dalam semangat modernitas maupun post-modernitas, salah satunya menyoroti persoalan ketimpangan pendidikan yang menjadi kunci terciptanya struktur sosial bias gender. Oleh karena itu, untuk merubah struktur sosial bias gender diperlukan transformasi pendidikan sebagai entry point-nya.*

### **Pendahuluan**

Pasca runtuhnya otoritas ortodoks (aufklarung) pada abad pertengahan, diskursus mengenai persoalan laki-laki dan perempuan (gender) semakin beroleh momentum relevansif dan landasan pijak historiknya yang cukup signifikan. Perkembangan sains dan teknologi modern yang dikemas melalui berbagai konstruksi pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang demokratis telah melahirkan kesadaran "nalar grafis": kesadaran modern-postmodern (istilah J. Goody: nalar khas masyarakat tulis) (Chumaidi Syarif Romas, 1996: 34), yang punya peran penting dalam mendobrak katup ideologi sosial bias gender (male-oriented, patriarkis, machismo, dan misogynis) dan sekaligus meretas kembali konstruksi sosial baru yang dapat mengatur alokasi peranan, kebijakan, atribut, hak, kewajiban dan tanggung jawab pada pria dan wanita berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan (equal and freedom) universal (Moeljarto Tjokrowinoto,

1996: 86).

Munculnya berbagai macam perbincangan (discourse), pemikiran dan pergerakan perempuan (politik, sosial, agama), baik pada skala internasional, regional, nasional maupun lokal seperti: forum tingkat tinggi yang khusus membicarakan perempuan (di Mexico 1975, Kopenhagen 1980,

Nairobi 1985 dan baru-baru ini di Beijing 1995), konferensi hak-hak asasi manusia, KTT perkembangan sosial, KTT bumi dan konferensi kependudukan, konferensi PBB tentang penghapusan segala "bentuk diskriminasi terhadap perempuan" (CEDEW), menunjukkan semangat modern-postmodern akan kesadaran feminis bahwa keberadaan perempuan mempunyai dampak sosiologik terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum (Farha Ciciek, 1996: 57; Mayling Oey-Gardiner dan Sulastri, 1996: 2-3), di mana fenomena tersebut akan dapat terealisasi apabila tercipta keseimbangan kedudukan dan peran sosial antara pria dan wanita.

Di Indonesia, gema (repercussion) kepedulian terhadap perempuan disuarakan lewat berbagai gerakan maupun organisasi sosial, politik dan keagamaan, organisasi profesional dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari wacana berbagai organisasi perempuan dalam skala global. Dengan demikian jelas bahwa perhatian terhadap perempuan merupakan bagian dari pergerakan global (global movement) yang merefleksikan kepedulian global untuk manusia (global concerns of mankind) terhadap perempuan (Moeljarto Tjokrowinoto, 1996: 82).

Perlu disadari bahwa adanya keragaman (pluralism) gerakan dan/atau organisasi perjuangan perempuan—di samping meningkatkan dinamika kualitas dan kuantitas wacana gender dengan aneka orientasi dan kepentingan ideologis—telah menimbulkan problema kerumitan tersendiri. Pada tataran ontologis, bias kepentingan ideologis nyata-nyata dapat mengaburkan wacana konstruktif tentang gender. Sedangkan, pada tataran sosial yang praksis empiris, bias kepentingan ideologis benar-benar dapat menjadikan diskursus tentang gender sebagai wacana sosiologis yang bias dan kontradiktif. Kenyataan menunjukkan, pada era yang dikenal sebagai "kesadaran renaissance" perempuan masih dipandang sebagai second class, makhluk domestik yang siklus gerakannya ada di sekitar "sumur, dapur dan kasur" (Siti Ruhaini Dzuhayatin, 1996: 67). Demikian pula, intensitas dan kualitas pelanggaran terhadap perempuan seperti: isu perkosaan, penganiayaan, penindasan dan pelecehan seksual semakin meningkat tajam. Diperkirakan dewasa ini setiap 6 menit seorang perempuan

diperkosa dan malahan dari tiga orang perempuan di Amerika mengalami serangan seksual dalam hidup mereka (Mansour Fakih, 1997: 3).

Dalam konteks demikian ini, pendidikan yang dipandang sebagai social engeneering belum sepenuhnya dapat memainkan peran vital sosio-akademiknya dalam upaya rekonstruksi ideologi sosial gender yang konstruktif sebagai element of social change menuju tatanan kehidupan masyarakat yang benar-benar deokratis. Secara utopia, representasi konstruk sosial masyarakat demokratis dalam perspektif gender dapat dideskripsikan sebagai masyarakat tanpa ketimpangan gender (genderless society), mungkinkah?.

#### **Diskursus Modernitas-Postmodernitas Tentang Gender**

Pada awalnya, isu gender yang diekspresikan dalam anatomi gerakan feminisme, menurut Dizard dan Badlin, merupakan konsumsi diskursus dan perjuangan golongan wanita kelas atas yang ingin membebaskan diri dari pekerjaan-pekerjaan rutinitas rumah tangga yang memang tak mempunyai jenjang karir seperti pekerjaan para suami (Ratna megawangi, 1994: 39). Terjadinya ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang bersifat trans-kultural, dalam perkembangan berikutnya, mampu menggelitik sensitivitas feminis, laki-laki maupun perempuan dari berbagai lapisan, untuk mendobrak—meminjam istilah Mohammed Arkoun—kungkungan logosentrisme ideologi dan struktur sosial tradisional yang bias gender. Menurut Garda Lerner, kaum tradisional, baik yang bekerja dalam kerangka agama maupun ilmiah menganggap sub-ordinasi perempuan

dalam sistem sosial lebih ditentukan oleh faktor biologis yang memang ketentuan Tuhan (Mansour Fakih: 5-6), bersifat alamiah (nature), dan oleh karena itu tak bisa diubah (given) dan harus diterima apa adanya (taken for granted) (Kamla Basin, 1996: 28). Eksistensi pandangan kaum tradisional ortodok, sebagaimana lazimnya wacana tradisionalisme, diperkuat oleh ideologi agama yang lebih normatif dan a-historis, pseudo-ilmiah seperti tesis Filsuf Aristoteles dan Psikoanalisis Sigmund Freud (konsep Penis very) yang menganggap "perempuan sebagai laki-laki yang tidak lengkap" (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997: xii), tradisi yang dimitoslegendakan yang kemudian terkristalisasi dalam semangat mental, kultur dan struktur masyarakat yang timpang.

Pada masa modern, diskursus gender telah mengalami perembesan ke dalam setiap relung sistem sosial kehidupan manusia dan merambah ke segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat atas, masyarakat menengah dan bahkan masyarakat tingkat bawah (grass roots) sekalipun. Dekonstruksi weltanschauung tradisionalisme bias gender pada dewasa ini pun banyak diekspresikan dalam berbagai sikap, pemikiran dan gerakan. Salah satu paradigma gerakan perempuan kontemporer yang paling populer ialah "gerakan feminisme".

Paling tidak ada empat tipologi gerakan feminisme yang mewarnai wacana dan diskursus gender post-tradisionalisme. Pertama, gerakan feminisme Liberal yang memiliki pandangan bahwa setiap orang diciptakan dengan hak-hak yang sama. Kedua, gerakan feminisme Radikal yang mengedepankan relasi seksual sebagai mainstream perjuangannya. Ketiga, gerakan feminisme Marxis

yang lebih menonjolkan perjuangannya pada sistem sosial ekonomi. Keempat, gerakan feminisme Sosialis yang mendasarkan misi perjuangannya pada perombakan sistem masyarakat patriarkis dan sistem ekonomi yang eksploitatif (kapitalistik) sebagai counter-culture-nya (Chris Weedon, 1989: 3-4; Farha Ciciek, 1996: 59-60).

Meskipun gerakan feminisme "sadar gender" pada masa modern industrial menampakkan wajah heterogenitasnya, namun secara garis besar aliran-aliran tersebut memiliki satu kesamaan pandang bahwa segala pemilikan pribadi, dalam hal ini pria memilki perempuan, adalah sumber penindasan. Keadilan akan tercapai bila sistem pemilikan diganti dengan sistem yang tanpa kelas: menghilangkan ketimpangan posisi antara pria dan wanita (Ratna Mega wangi, 1994: 31).

Diakui bahwa gerakan perjuangan wanita modern telah membawa perubahan yang cukup mendasar. Perempuan memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam sektor publik: sosial, ekonomi, pendidikan dan politik, dan memasuki semua sektor yang tadinya dimonopoli oleh kaum pria. Namun demikian ada satu hal yang tidak bisa dinafikan bahwa kemajuan modernisme yang mewarnai dinamika gerakan perjuangan perempuan kontemporer telah menimbulkan eksese negatif yang cukup akut. Sebagai contoh, semakin merebaknya isu pemiskinan dan penindasan perempuan yang dimodernisasikan, desakralisasi perkawinan, tingginya angka perceraian dan lain sebagainya. Isu-isu kontra modernisme inilah yang kemudian mengilhami lahirnya era perbincangan pasca-feminis (the talk of post-feminist era) (Ibid.).

Dalam pandangan Ivan Illich,

masyarakat modern-industrial menampakkan wataknya yang dualistik: anti diskriminasi gender dengan slogan utamanya kesetaraan dan kebebasan (equal and freedom) dan sekaligus seksis. Uniknya, di sini para feminis malah berjuang menurut kesetaraan tanpa mengetahui bahwa kesetaraan antara jenis hanya mitos karangan masyarakat industrialis yang seksis --yang bahkan sudah memproduksi semacam "kaca mata kuda" bagi semua anggotanya-- termasuk feminis sendiri. Dalam konteks ini Illic (1998: vii-ix; 1-5) menyebutnya sebagai transisi dari era pengayoman gender menjadi rezim seksual.

Tampaknya, post-modernitas ingin mewarnai anarkhisme perjuangan perempuan masyarakat modern industrial yang cenderung menempatkan permasalahan perempuan sebagai permasalahan universal dan mengabaikan struktur sosial budaya yang menggarisbawahi permasalahan tersebut dengan spiritualitas gender yang tercermin dalam semboyan: keakraban, persahabatan dan komitmen. Ia melihat bahwa masalah perempuan dan hubungannya dengan gender adalah sebuah konstruksi sosial di mana masalah itu timbul. Dalam melakukan kontra-modernisme para sosiolog pascamodern seperti Rachel-Hare Mustin dan Lynn Hoffman, lebih menekankan perhatiannya pada struktur sosial budaya yang menjadi latar permasalahan perempuan dan menolak segala bentuk doktrin yang mengeneralisir permasalahan gender (Ratna Megawangi: 38).

Dengan lahirnya spiritualitas baru tersebut, sekarang mulai banyak ditemui gagasan feminisme yang berperspektif multikultural, plural, kedaerahan (vernacular) dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan

feminisme yang ada sekarang pun tidak terlalu menonjolkan isu-isu global sebagaimana wacana gerakan yang dikembangkan feminisme modern, tapi lebih mengarah pada kepedulian social dengan sifatnya yang lokal. Seperti gerakan feminis anti-pornografi (anti-pornofeminist), gerakan feminis peduli lingkungan (eco-feminist), gerakan feminis anti kekerasan (anti-violence feminist), feminis yang menyuarakan perdamaian dan anti perang (pacifist feminist), gerakan feminis yang ingin kembali pada nilai-nilai agama (new age feminist) dan lain sebagainya (Ibid.: 40-41).

### **Dampak Sosiologis Praktek Pendidikan Bias Gender**

Terjadinya ketimpangan pada level kultur dan struktur sosial bias gender dalam kehidupan masyarakat tradisional dan/atau modern, salah satu penyebab utamanya adalah sistem pendidikan yang seksis. Bangkitnya kesadaran feminis pada masyarakat modern dan tenggelamnya sensitivitas gender pada masyarakat tradisional juga tidak bisa dilepaskan dari topografi kependidikan yang ada. Bagaimana pun, pendidikan --tegas Nancy E. Riley (1997: 7)-- merupakan salah satu elemen sosial yang cukup esensial dan sekaligus sumber kesempatan (opportunities) yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan membaca dan menulis dapat membuka peluang besar bagi setiap orang, tidak saja untuk mengakses ilmu pengetahuan seluas-luasnya, tapi juga di dalam memperoleh kesempatan untuk dapat berkiprah dalam setiap sektor kehidupan.

Rendahnya kualitas pendidikan kaum hawa --yang menurut perspektif feminis-- diakibatkan oleh dominasi dan supremasi kontrol laki-laki atas seluruh bidang pendidikan,

pengetahuan: filsafat, teologi, hukum, seni, sastra, alam, dan teknologi, telah menempatkan perempuan pada status sosial yang rendah (*second class*), terbelakang (*underprivileged*) dan tersub-ordinasikan dalam seluruh sektor riil kehidupan. Menurut Kamla Basin (1996: 14) hegemoni laki-laki atas penciptaan pengetahuan telah menyingkirkan pengetahuan dan pengalaman perempuan, keahlian dan aspirasi mereka. Sementara itu, Sylvia Walby mengemukakan argumentasi yang senada bahwa dominasi laki-laki atas perempuan dalam penguasaan pengetahuan dan pendidikan telah melestarikan ideologi patriarki dan menciptakan apa yang disebut "suatu ragam bentuk-bentuk subyektivitas yang berdasarkan gender" pada tingkat relasi sosial.

Terpasungnya potensi akademik perempuan untuk memasuki bidang-bidang pekerjaan non-tradisional, menurut Moeljarto Tjokrowinoto (1996: 61-61), diakibatkan oleh adanya kesenjangan dalam tingkat pendidikan antara pria dan wanita, atau -- meminjam istilah Illich-- pendidikan saat ini lebih bercorak seksis-kapitalis. Kesenjangan ini secara faktual kuantitatif dapat dilihat dari, misalnya, data 1987 tentang prosentase pendidikan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa pada tingkat SD, wanita merupakan 48,09 persen dari keseluruhan murid SD; pada tingkat SLTP 39,41 persen; pada tingkat SLTA 36,17 persen dan Perguruan Tinggi 32,56 persen, Angka buta huruf bagi pria 12,11 persen, sedang bagi wanita 25,72 persen.

Lebih lanjut, Moeljarto menjelaskan bahwa rendahnya kualifikasi pendidikan wanita sangat menentukan kemampuannya di dalam memasuki sektor-sektor publik. Data menunjukkan bahwa wanita cenderung

bekerja pada sektor-sektor yang produktifitasnya rendah. Sementara sektor-sektor lain yang produktifitasnya tinggi sifatnya masih sangat maskulin. Sex ratio di bidang ini mengungkap dominasi pria atas wanita. Demikian pula dalam bidang-bidang lain seperti: birokrasi, politik atau pemerintahan, ekonomi, pembangunan maupun lembaga sosial lainnya, kondisinya tidak jauh beda.

Di Indonesia, kesenjangan primordial semacam itu masih sangat kentara sekali. Meskipun perempuan telah diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki di bidang pendidikan, namun persepsi masyarakat terhadap perempuan tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Perempuan tetap saja dipandang sebagai *the second sex*, direndahkan ketika mereka hanya di rumah dan dieksploitasi ketika mereka berada di tempat kerja. Perempuan dalam kapasitasnya ibu rumah tangga dan pendidik generasi muda, sering didekriditkan, tidak saja oleh masyarakat tapi juga negara, atas terjadinya krisis identitas dan moralitas anak-anak (remaja), memikul dosa-dosa profesionalisme suaminya dan segudang persoalan lainnya. Persepsi di atas tidak hanya ada pada masyarakat awam dengan indikator pendidikan rendah tapi juga di kalangan cendekiawan dengan indikator pendidikan yang tinggi (Siti Ruhaini Dzuhayatin, 1997: 75-77).

#### **Rekonstruksi Demokratisasi Pendidikan Menuju "Genderless Society"**

Meskipun pada hakekatnya laki-laki dan perempuan memiliki status ontologis, posisi dan peran setara dalam kehidupan, namun bukan berarti tidak akan terjadi ketimpangan gender. Dalam kehidupan sosial yang praksis empiris terjadinya kesenjangan

gender dapat dianggap sebagai satu kelaziman (*orde of nature*). Demikian pula halnya dengan instabilitas struktur kosmik kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai dimensinya yang -barangkali- tidak memiliki keterkaitan hirarkhis dengan persoalan gender. Hal ini bisa dimaklumi karena dalam kontrak sosial, disamping adanya kebutuhan bersama, terselip kepentingan, asumsi dan bahkan persaingan.

Dalam konteks ini, elemen apapun yang digunakan, termasuk pendidikan, untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi sebagai upaya mewujudkan angan-angan sosial "masyarakat anti-diskriminasi gender" dapat dianggap sebagai persoalan yang utopis. Seperti diungkap oleh Ivan Illich (1998: 11-12), bahwa ikhtiar membangun struktur sosial tanpa hirarkhi seksis atau *genderless society* merupakan kondisi ideal yang tak akan mungkin tergapai, sama seperti cita-cita masyarakat pra-industri tanpa gender: tanpa pembagian yang jelas antara apa yang dilakukan, dikatakan dan dilihat oleh laki-laki dan perempuan. Seperti utopisnya perjuangan kaum sosialis-marxisme yang mengidealkan struktur masyarakat tanpa kelas menuju terwujudnya masyarakat komunis paripurna.

Tanpa harus larut dalam kontra pendapat di atas, satu hal yang meski diperhatikan ialah bagaimana membangun kesadaran gender pada seluruh strata lapisan sosial dan sekaligus membongkar mitos ideologi seksisme dalam rangka menata kembali struktur sosial yang lebih manusiawi?. Dalam hal ini, menegakkan kembali independensi pendidikan dari wacana seksisme adalah langkah yang cukup strategis.

Adapun beberapa langkah praksis yang dapat ditempuh antara lain ialah:

Pertama, mengembangkan dialektika sosio-akademik menuju terwujudnya kesadaran feminis (*feminism consciousness*) bagi laki-laki maupun perempuan. Sebab tanpa adanya kesadaran feminis, dialog sosial antara keduanya hanya akan mengarah pada terciptanya ketegangan diskriminatif yang berakibat pada dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Dialektika yang dibangun hendaknya tidak terbatas pada kalangan akademisi tingkat atas ataupun menengah tapi harus menyentuh pula pada akar bawah.

Dalam hal ini Ruhaini (1997: 67-68) menyatakan bahwa dialektika transformasi sosial yang disuarakan para elit akademisi jarang yang menyentuh kelompok kelas bawah, termasuk dalam hal ini persoalan gender. Akibatnya, gagasan transformasi pendidikan untuk membangun *weltanscaung* sosial yang berwawasan gender hanya berputar di tingkat atas.

Kedua, rekonstruksi sistem pengetahuan dan pendidikan yang berwawasan gender. Keberadaan dunia pendidikan baik pada masa tradisional maupun modern masih mengesankan aura patriarkis. Menurut pandangan sementara kaum feminis, sistem pengetahuan dan pendidikan patriarkhal dicirikan oleh pembagian, pembedaan, pertentangan dan dualisme (Kamla Basin, 1996: 15). Untuk menggagas rekonstruksi pendidikan relevan kiranya melibatkan keberadaan agama sebagai salah satu elemen *vital social engineering*. Seperti tawaran Armahedi Mahzar dengan konsep sosio-transendentalnya yang dikenal dengan gerakan "pasca feminisme Islami" yang integratif guna membendung gerakan anti-feminisme tradisional yang konservatif dan desakan pro-feminisme (radikal) yang

agresif (progresif sekular). Gerakan ini diharapkan dapat memberikan konstribusinya dalam: pertama, mencairkan eksklusivitas gerakan feminis radikal yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai lawan yang saling mengalahkan; kedua, gerakan ini akan mampu mendobrak persepsi tradisional dan konservatif yang mendewakan supremasi laki-laki atas perempuan (Siti Ruhaini Dzuhayatin: 78).

Ketiga, mengembangkan organisasi sosial, organisasi agama, organisasi profesional maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat sebagai medium alternatif bagi women empowerment. Tidak seperti pembentukan wadah perempuan yang dipaksakan dari atas dan penuh nuansa politis seperti: PKK, Darma Wanita, Darma Pertiwi, Kowani dan lain sebagainya. Pola-pola LSM Transformatif dengan paradigma kontra diskursus dan populer education yang dikembangkan, sebagaimana yang berkembang dewasa ini, sangat membantu di dalam melakukan pemberdayaan perempuan (Mansour Fakih, 1996: 105).

Keempat, pemberdayaan perempuan lewat program studi kewanitaan (women studies) baik lewat lembaga pendidikan formal maupun non-formal seperti yang mulai dirintis oleh UI dan UGM yang bekerja sama dengan beberapa founding yang memiliki kepedulian dalam bidang sejenis. Pola jaringan akademik dan action research yang menjadi acuan pergerakannya, akan dapat memberikan konstribusi konkrit dalam pembangunan struktur sosial yang konstruktif.

Kelima, untuk konteks Indonesia, perlu kiranya dikembangkan studi kawasan tentang gender yang memiliki basis sosio-kultural keindonesiaan tanpa melepaskan secara primordialistik dengan wacana global gender. Sebab, saat ini banyak pemikiran maupun organisasi yang bergerak dalam spesialisasi kajian gender lebih terobsesi pada konstruk universal ideologi modernitas gender dan romantisme konsepsi gender yang dibawa postmodernitas serta menafikan konsep analisa gender kedaerahan yang justru memiliki garis sosio-kultural yang jelas.

### Penutup

Gerakan modernitas telah memberikan sumbangan cukup besar dalam menggugah kesadaran perempuan dalam melihat isu-isu global mengenai ketidakadilan struktur sosial. Demikian halnya, dengan kritik post-modernitas terhadap kecenderungan universalisme tema pergerakan perempuan dalam melakukan transformasi sosial. Kedua paradigma pergerakan tersebut - terlepas dari kekurangan dan kelebihan masing-masing-memiliki andil besar dalam mendinamiskan gerakan gender dewasa ini. Sebagai contoh, kedua paradigma tersebut menyoroti sangat tajam persoalan genderless society berbasis pendidikan yang kurang demokratis. Keduanya merekomendasikan perubahan sistem dan praktek pendidikan bias gender sebagai instrumen penting untuk merealisasikan transformasi sosial yang lebih demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bhasin, Kamla. 1996. Menggugat Patriarki Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan. Yogyakarta: Bentang.
- Ciciek, Farha. 1996. Wacana Keperempuanan Mutakhir, dalam, M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed.) Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern. Yogyakarta: Pusat Studi Islam UIL.
- Dzuhayati, Siti Ruhaini. 1996. Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer, dalam, M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed.) Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern. Yogyakarta: Pusat Studi Islam UIL.
- Illich, Ivan. 1998. Matinya Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Megawangi, Ratna. 1994. Feminisme: Menindas Peran Ibu Rumah Tangga. Jurnal Ulumul Qur'an No. 5 & 6, Vol 5. Jakarta: LSAF&ICMI.
- Romas, Chumaidi Syarief. 1996. Teologi-Yurisprudensi Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Kontemporer, dalam, M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed.), Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern. Yogyakarta: Pusat Studi Islam UIL.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.